

# PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DI OBYEK WISATA

(STUDI DESKRIPTIF TENTANG USAHA PENGEMBANGAN SARANA  
TRANSPORTASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
UNTUK MEMAJUKAN OBYEK WISATA WADUK WONOREJO)

KK

Februari 14/05

Man

P

## TUGAS AKHIR



OLEH :

*Nita Dwi Nantasari*

NIM : 070010672-S



PROGRAM STUDI D III PARIWISATA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A

2004

# PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DI OBYEK WISATA

(STUDI DESKRIPTIF TENTANG USAHA PENGEMBANGAN SARANA  
TRANSPORTASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
UNTUK MEMAJUKAN OBYEK WISATA WADUK WONOREJO)

## TUGAS AKHIR

**Sebagai Syarat Untuk Menempuh Gelar Ahli Madya  
Pada Program Studi D-III Pariwisata  
Universitas Airlangga**



**OLEH :**

*Nita Dwi Nantasari*

**NIM : 070010672-S**

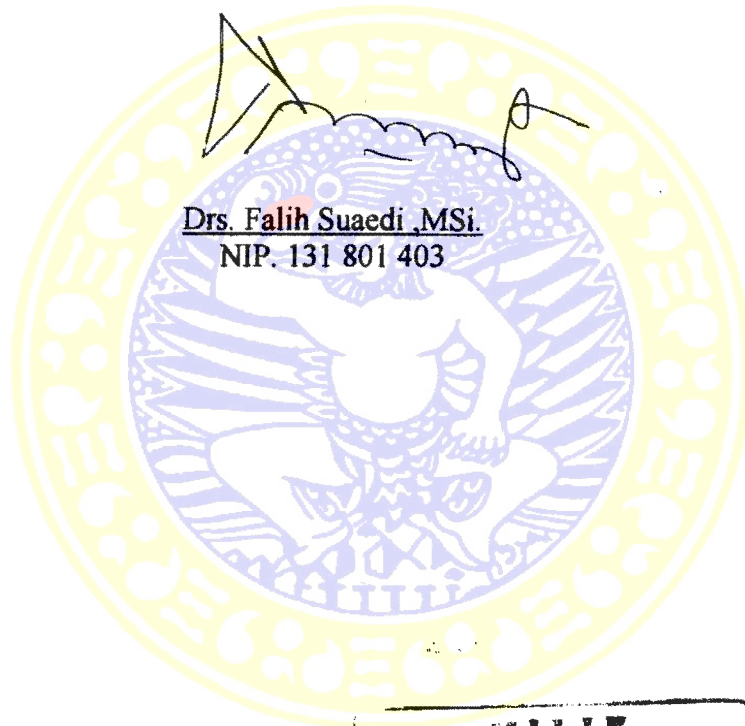
**PROGRAM STUDI D III PARIWISATA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A**

**2004**

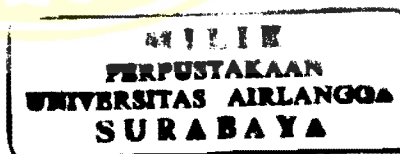
**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tugas Akhir ini telah disetujui untuk diujikan  
Surabaya, 30 Juni 2004

Dosen Pembimbing



Drs. Falih Suaedi, MSi.  
NIP. 131 801 403



## ABSTRAKSI

Dalam perkembangan pariwisata dewasa ini, kelengkapan alat transportasi dan kemudahan aksesibilitas di obyek wisata merupakan faktor yang paling mendasar dalam suatu industri pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata dalam gaya hidup modern ini bukan hanya dikonsumsi oleh kaum menengah ke atas saja melainkan juga oleh kaum menengah kebawah. Suatu industri pariwisata seolah tak mungkin lepas dari sarana transportasi. Untuk itu, pengadaan sarana transportasi umum sangat diperlukan di suatu kawasan wisata. Obyek wisata merupakan akhir dari perjalanan wisata dan harus memenuhi syarat aksesibilitas, artinya obyek wisata tersebut harus mudah dicapai dan dengan sendirinya juga mudah ditemukan. Oleh karena itu harus selalu ada jalan menuju obyek wisata. Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas sesuatu obyek wisata. Serta yang terakhir "*how to reach*" dimana daerah tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah dan harus tersedia sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau obyek wisata tersebut. Adanya sarana angkutan bukanlah jaminan terjadinya suatu transferabilitas. Sarana angkutan yang memenuhi syarat, memungkinkan suatu daerah wisata dapat intens dikunjungi oleh wisatawan dan dapatlah terjadi transferabilitas. Guna membantu industri pariwisata, negara dapat mengambil berbagai langkah mulai dari memantapkan situasi yang layak bagi investasi swasta sampai pada pengeluaran ketentuan-ketentuan yang menjamin kestabilan ekonomi, dan secara aktif mempersiapkan para investor dalam pariwisata dengan subsidi-subsidi yang luar biasa. Kebijakan pemerintah dalam bidang kepariwisataan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari kebijakan nasional, yang telah digariskan baik dalam GBHN maupun dalam program-program PELITA. Hal ini telah dirumuskan dalam program pengembangan pariwisata pada setiap PELITA, yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan bagian internal dari pengembangan pariwisata nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata selalu didasarkan dan sejalan dengan kebijakan, pola pengembangan dan tujuan-tujuan nasional. Untuk meningkatkan arus wisatawan, maka pembangunan harus memperhatikan penunjang dan pariwisata yang di dalamnya terdapat elemen transportasi pariwisata. Dengan adanya elemen transportasi pariwisata ini dapat menunjang lancarnya pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan dunia pariwisata Indonesia akan segera terwujud apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengelola wisata. Kerjasama dalam hal ini haruslah didominasi oleh pemerintah. Karena pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan pihak yang utama dalam suatu pengembangan suatu obyek wisata.

